



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit dan Kecamatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

17. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
20. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
- a. Jabatan Manajerial meliputi:
 - 1. ruang lingkup dan dampak;
 - 2. pengaturan organisasi;
 - 3. wewenang;
 - 4. sifat hubungan;
 - 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Non-Manajerial meliputi:
 - 1. pengetahuan dan keahlian;
 - 2. pengawasan;
 - 3. pedoman kerja;
 - 4. kompleksitas;
 - 5. ruang lingkup dan dampak;
 - 6. hubungan interpersonal;
 - 7. tujuan hubungan;
 - 8. tuntutan fisik; dan
 - 9. lingkungan kerja.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS.

Pasal 6

Nomenklatur jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional harus sesuai dengan struktur organisasi, analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IV USUL EVALUASI JABATAN BARU

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru dibuat setelah melalui usul evaluasi jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian yang berwenang;
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru apabila :
 - a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;

- b. Penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
- c. Hal-hal yang menyebabkan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 9 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDELA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN
 JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
1	2	3	4	5
15	3155-3600	Sekretaris Daerah	15	3555
14	2755-3150	1 . Asisten 2 . Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3 . Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 4 . Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 . Kepala Inspektorat Kab. Kotawaringin Timur	14A	3030
		1 . Sekretaris DPRD 2 . Kepala Badan/Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, 3 . Direktur RSUD. Dr.Murjani Sampit	14B	2865
13	2355-2750	Staf Ahli Bupati	13	2715
12	2105-2350	1 . Kepala Bagian Sekretariat Daerah 2 . Camat	12A	2315
		1 . Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2 . Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah 3 . Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 . Sekretaris Inspektorat Kab. Kotawaringin Timur	12B	2140
		1 . Sekretaris Badan/Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Wakil , Direktur Akademi Keperawatan	12C	2115

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
1	2	3	4	5
		2 . Direktur RSUD. Dr.Murjani Sampit 3 . Direktur Akademi Keperawatan		
11	1855-2100	1 . Kepala Bagian Sekretariat Dewan 2 . Sekretaris Dewan Pengurus Korpri 3 . Sekretaris Kecamatan	11A	2090
		Kepala Bidang Dinas/ Badan	11B	2045
		Inspektur Pembantu	11C	1990
9	1355-1600	Lurah	9A	1540
		1 . Kepala Sub Bagian / Bidang / Seksi dengan Pelaksana PNS kelas 7 2 . Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	9B	1430
8	1105-1350	1 . Kepala Sub Bagian / Bidang / Seksi dengan Pelaksana PNS dibawah kelas 7 2 . Sekretaris Kelurahan 3 . Kepala Urusan 4 . Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah	8	1295

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Setoran dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
14	2755-3150			Dokter Utama	14	2805
12	2105-2350			1 . Dokter Madya 2 . Dokter Gigi Madya	12	2225
11	1855-2100			Penyuluh Pertanian Madya	11A	2030
				1 . Guru Madya 2 . Pengawas Sekolah Madya	11B	1960
				Apoteker Madya	11C	1945
				1 . Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya 2 . Instruktur Madya 3 . Penilik Madya 4 . Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya 5 . Perencana Madya 6 . Sanitarian Madya	11D	1930
10	1605-1850			Dokter Muda	10A	1720
				Dokter Gigi Muda	10B	1670
9	1355-1600			Penata Anestesi Muda	9A	1600
				Dokter Pertama	9B	1570
				Nutrisionis Muda	9C	1555
				1 . Guru Muda 2 . Pengawas Sekolah Muda	9D	1385

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
				3 . Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 4 . Penyuluh Pertanian Muda 5 . Perawat Muda		
				1 . Apoteker Muda 2 . Dokter Gigi Pertama 3 . Sanitarian Muda	9E	1370
				1 . Auditor Muda 2 . Bidan Muda 3 . Instruktur Muda 4 . Peneliti Muda 5 . Penilik Muda 6 . Perancang Peraturan Perundang undangan Muda	9F	1355
8	1105-1350			1 . Penyuluh Pertanian Pertama 2 . Perawat Pertama	8A	1310
				1 . Apoteker Pertama 2 . Sanitarian Pertama	8B	1295
			Asisten Penata Anestesi Penyelia		8C	1290
				1 . Auditor Pertama 2 . Auditor Kepegawaian Pertama 3 Perancang Peraturan Perundang undangan Pertama 4 . Analis Kepegawaian Pertama 5 . Bidan Pertama 6 . Guru Pertama 7 . Nutrisisionis Pertama 8 Perencana Pertama 9 . Penilik Pertama	8D	1280
			1 . Penyuluh Pertanian Penyelia 2 . Perawat Gigi Penyelia 3 . Perawat Penyelia 4 . Perekam Medis Penyelia 5 . Radiografer Medis Penyelia		8E	1260

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
			1 . Asisten Apoteker Penyelia 2 . Sanitarian Penyelia		8F	1245
			1 . Bidan Penyelia 2 . Fisioterapis Penyelia 3 . Nutrisisionis Penyelia 4 . Pekerja Sosial Penyelia 5 . Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia		8G	1230
7	855-1100		1 . Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 2 . Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 3 . Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 4 . Perawat Pelaksana Lanjutan 5 . Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 6 . Radiografer Pelaksana Lanjutan 7 . Refraksi Optisi Pelaksana Lanjutan		7A	1035
			1 . Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 2 . Sanitarian Pelaksana Lanjutan		7B	1020
			Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan		7C	1015
			1 . Bidan Pelaksana Lanjutan 2 . Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 3 . Instruktur Pelaksana Lanjutan 4 . Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan		7D	1005

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
			5 . Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan			
		1 . Kurator Koleksi Museum 2 . Pemeriksa Kekayaan Negara 3 . Pemeriksa Keselamatan Pelayaran 4 . Penata Laporan Keuangan 5 . Pengamat Perbekalan 6 . Pengawas Lalu Lintas Darat 7 . Pengawas Pelabuhan 8 . Pengawas Perpustakaan 9 . Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10 . Pengendali Teknologi Informasi 11 . Pengevaluasi Akademik 12 . Penyuluh Kearsipan 13 . Penyuluh Koperasi 14 . Penyuluh Perpustakaan 15 . Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 16 . Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga 17 . Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 18 . Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana 19 . Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar 20 . Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar			7E	890

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		21 . Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 22 . Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup 23 . Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya 24 . Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 25 . Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan 26 . Penyusun Rencana Kerja Sama Industri 27 . Penyusun Rencana Pendidikan Dan Kerjasama 28 . Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan 29 . Penyusun Teknis Usaha Budidaya 30 . Analis Diklat 31 . Analis Akses Industri 32 . Analis Bencana 33 . Analis Kawasan Transmigrasi 34 . Analis Kebakaran 35 . Analis Koperasi 36 . Analis Lingkungan Hidup 37 . Analis Materi Penyuluhan 38 . Analis Pangan Analis Pemasaran Hasil Pertanian				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		39 . Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 40 . Analis Bangunan dan Perumahan 41 . Analis Benih 42 . Analis Data dan Informasi 43 . Analis Informasi 44 . Analis Jabatan 45 . Analis Jalan Jembatan 46 . Analis Kelembagaan 47 . Analis Kemasyarakatan 48 . Analis Keolahragaan 49 . Analis Kerjasama Lintas Sektor 50 . Analis Kinerja 51 . Analis Kompetensi 52 . Analis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja 53 . Analis Kompetensi Tenaga Pengajar 54 . Analis Kurikulum dan Pembelajaran 55 . Analis Lahan Pertanian 56 . Analis Laporan Keuangan 57 . Analis Pajak dan Retribusi Daerah 58 . Analis Pemanfaatan Ruang 59 . Analis Pembangunan 60 . Analis Pemberdayaan Masyarakat 61 . Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		62 . Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak 63 . Analis Pemerintahan Daerah 64 . Analis Penanaman Modal 65 . Analis Penataan Kawasan 66 . Analis Pendaftaran Kapal Perikanan 67 . Analis Pendapatan Daerah 68 . Analis Pengamanan Lingkungan 69 . Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan 70 . Analis Pengelolaan Sarana Program 71 . Analis Pengembangan Infrastruktur 72 . Analis Pengembangan Potensi Daerah 73 . Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 74 . Analis Pengembangan Usaha Agroindustri 75 . Analis Pengolah Hasil Pertanian 76 . Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 77 . Analis Perdagangan 78 . Analis Perencanaan 79 . Analis Perencanaan Anggaran 80 . Analis Perencanaan dan Kerjasama 81 . Analis Perikanan Budidaya				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		82 Analis Perizinan Layanan Jasa 83 Analis Perlindungan Perempuan 84 . Analis Pertanahan 85 . Analis Peserta Didik 86 . Analis Protokol 87 . Analis Sistem Informasi 88 . Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 89 . Analis Sumber Daya Air 90 . Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 91 . Analis Tata Kelola Sumber Daya Ikan 92 . Analis Tata Laksana 93 . Analis Tata Usaha 94 . Analis Tenaga Kerja 95 . Bendahara 96 . Pemeriksa Jalan dan Jembatan 97 . Pemeriksa Keselamatan Darat 98 . Penata Bangunan Gedung dan Permukiman 99 . Penata Laporan Keuangan 100 . Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman 101 . Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 102 . Penelaah Mutu Konstruksi 103 . Pengawas Irigasi 104 . Pengawas Jalan dan Jembatan 105 . Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		106 . Pengawas Pengoperasian Alat Berat 107 . Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan 108 . Pengawas Tata Pertamanan 109 . Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura 110 . Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton 111 . Penyuluh Kemasyarakatan 112 . Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 113 . Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 114 . Penyusun Rancangan Perundang-Undangan 115 . Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 116 . Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan 117 . Penyusun Rencana Tata Ruang 118 . Penyusun Risalah 119 . Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 120 . Perancang Sistem Informasi Kepegawaian				
6	655-850		1 . Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana 2 . Penyuluh Pertanian Pelaksana 3 . Perawat Gigi Pelaksana 4 . Perawat Pelaksana 5 . Radiografer Pelaksana 6 . Refraksi Optisi Pelaksana		6A	770

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
			1 . Asisten Apoteker Pelaksana 2 . Sanitarian Pelaksana		6B	755
			Polisi Pamong Praja Pelaksana		6C	745
			1 . Bidan Pelaksana 2 . Fisioterapis Pelaksana 3 . Instruktur Pelaksana 4 . Nutrisionis Pelaksana 5 . Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 6 . Teknisi Transfusi Darah Pelaksana		6D	740
		1 . Ajudan 2 . Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 3 . Jurnalis 4 . Notulis Rapat 5 . Operator Sandi dan Telekomunikasi 6 . Pengelola Administrasi Pemerintahan 7 . Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian 8 . Pengelola Bahan Perencanaan 9 . Pengelola Bantuan Keagamaan 10 . Pengelola Barang Milik Negara 11 . Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya 12 . Pengelola Data 13 . Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi			6E	690

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		14 . Pengelola Data Alur dan Perambuan Sungai Danau dan Penyeberangan 15 . Pengelola Data Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 16 . Pengelola Data Bantuan Sosial 17 . Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum 18 . Pengelola Data dan Sistem Pembelajaran 19 . Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban 20 . Pengelola Data Kekayaan Budaya 21 . Pengelola Data Keuangan Daerah 22 . Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor 23 . Pengelola Data Pengendalian Masyarakat 24 . Pengelola Data Sejarah 25 . Pengelola Disiplin Pegawai 26 . Pengelola Distribusi dan Pemasaran 27 . Pengelola Dokumen Perizinan 28 . Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan 29 . Pengelola Dokumentasi 30 . Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		31 . Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai 32 . Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri 33 . Pengelola Informasi Akademik 34 . Pengelola Informasi Kerjasama 35 . Pengelola Informasi Lingkungan 36 . Pengelola Informasi Produk Hukum 37 . Pengelola Instalasi 38 . Pengelola Keamanan dan Ketertiban 39 . Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi 40 . Pengelola Kefarmasian 41 . Pengelola Kepegawaian 42 . Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 43 . Pengelola Kesejahteraan Sosial 44 . Pengelola Ketahanan Pangan 45 . Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 46 . Pengelola Keuangan 47 . Pengelola Laboratorium 48 . Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 49 . Pengelola Laporan Data Penerimaan 50 . Pengelola Laporan Keuangan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		51 . Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia 52 . Pengelola Layanan Operasional 53 . Pengelola Media Cetak 54 . Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen 55 . Pengelola Objek Wisata 56 . Pengelola Pasar 57 . Pengelola PBB P2 dan BPHTB 58 . Pengelola Pelayanan Kesehatan 59 . Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia 60 . Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 61 . Pengelola Pemantauan 62 . Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 63 . Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan 64 . Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung 65 . Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 66 . Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak 67 . Pengelola Pembinaan Pembangunan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		68 . Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi 69 . Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi 70 . Pengelola Penagihan dan Pengawasan 71 . Pengelola Penataan Sampah 72 . Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi 73 . Pengelola Penelitian 74 . Pengelola Penerangan Jalan 75 . Pengelola Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 76 . Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi 77 . Pengelola Penganekaragaman Pangan 78 . Pengelola Pengawasan 79 . Pengelola Pengawasan LLAJ 80 . Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha 81 . Pengelola Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan 82 . Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang 83 . Pengelola Pengendalian dan Operasional 84 . Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		85 . Pengelola Pengujian Kendaraan 86 . Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai 87 . Pengelola Penyakit Tidak Menular 88 . Pengelola Penyehatan Lingkungan 89 . Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah 90 . Pengelola Perizinan 91 . Pengelola Perjalanan Dinas 92 . Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan 93 . Pengelola Perparkiran 94 . Pengelola Perpustakaan 95 . Pengelola Perumahan dan Permukiman 96 . Pengelola Peserta Didik 97 . Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia 98 . Pengelola Program dan Kegiatan 99 . Pengelola Program dan Laporan 100 . Pengelola Program Gizi 101 . Pengelola Program Imunisasi 102 . Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 103 . Pengelola Program Kesehatan Keluarga 104 . Pengelola Pustaka Elektronik 105 . Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 106 . Pengelola Rehabilitasi Sosial 107 . Pengelola Retribusi Terminal				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		108 . Pengelola Sampel Pengujian 109 . Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran 110 . Pengelola Sarana Perindustrian 111 . Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas 112 . Pengelola Sistem dan Jaringan 113 . Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 114 . Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 115 . Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan 116 . Pengelola Situs atau Web 117 . Pengelola Sumber Daya Air 118 . Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah 119 . Pengelola Surat 120 . Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian 121 . Pengelola Teknis Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan 122 . Pengelola Teknologi Informasi 123 . Pengelola Teknologi Perbenihan 124 . Pengelola Terminal 125 . Pengelola Usaha Kepariwisataaan 126 . Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan 127 . Pengolah Daftar Gaji				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		128 . Pengolah Data 129 . Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan 130 . Pengolah Data dan Informasi Penilaian 131 . Pengolah Data Informasi dan Hukum 132 . Pengolah Data Keberatan dan Banding 133 . Pengolah Data Laporan Keuangan 134 . Pengolah Data Pelayanan 135 . Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara 136 . Pengolah Data Pengelolaan Keuangan 137 . Pengolah Data Perbendaharaan 138 . Pengolah Data Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 139 . Petugas Protokol 140 . Pranata Barang dan Jasa 141 . Pranata Kearsipan 142 . Pranata Laboratorium Kearsipan 143 . Pranata Pasukan Pengamanan Dalam 144 . Pranata Pemadam Kebakaran 145 . Pranata Pengambilan Sampel 146 . Pranata Reproduksi Arsip 147 . Pranata Taman Makam Pahlawan 148 . Verifikator Anggaran 149 . Verifikator Data Laporan Keuangan 150 . Verifikator Keuangan				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		151 . Verifikator Pajak				
5	455-650		Polisi Pamong Praja Pemula		5A	580
			Penyuluh Pertanian Pelaksana		5B	570
			1 . Perawat Pelaksana Pemula 2 . Perawat Gigi Pelaksana Pemula		5C	520
			1 . Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 2 . Sanitarian Pelaksana Pemula		5D	505
			1 . Bidan Pelaksana Pemula 2 . Fisioterapis Pelaksana Pemula 3 . Nutrisionis Pelaksana Pemula 4 . Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula 5 . Radiografer Pelaksana Pemula 6 . Refraksi Optisi Pelaksana Pemula 7 . Sanitarian Pemula 8 . Teknisi Transfusi Darah Pemula		5E	490
		1 . Juru Survei Permukiman Perumahan 2 . Juru Pungut Retribusi 3 . Komandan Petugas Keamanan 4 . Operator Alat Berat 5 . Operator Mesin 6 . Pemandu Museum 7 . Pemandu Wisata 8 . Pemelihara Koleksi dan Museum 9 . Pemelihara Penerangan Jalan			5E	490

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		10 . Pemelihara Sarana dan Prasarana 11 . Penagih Retribusi 12 . Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media 13 . Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi 14 . Pengadministrasi Gudang Farmasi 15 . Pengadministrasi Hukum 16 . Pengadministrasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal 17 . Pengadministrasi Kepegawaian 18 . Pengadministrasi Keuangan 19 . Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 20 . Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah 21 . Pengadministrasi Pajak 22 . Pengadministrasi Pelatihan 23 . Pengadministrasi Pemerintahan 24 . Pengadministrasi Perencanaan dan Program 25 . Pengadministrasi Perpustakaan 26 . Pengadministrasi Persuratan 27 . Pengadministrasi Program dan Kerjasama 28 . Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi 29 . Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				

KELAS	RANGE KELAS JABATAN	NAMA JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGIONAL TERTENTU		KATEGORI KELAS	NILAI JABATAN
			UMUM			
			TERAMPIL	AHLI		
1	2	3	4	5	6	7
		30 . Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha 31 . Pengadministrasi Umum 32 . Pramu Benih Ikan 33 . Pranata Taman 34 . Teknisi Air 35 . Teknisi Elektronik 36 . Teknisi Jaringan Instalasi 37 . Teknisi Listrik dan Jaringan 38 . Teknisi Mesin 39 . Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 40 . Teknisi Peralatan dan Mesin 41 . Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika				
3	305-370	1 . Juru Rawat Jenazah 2 . Pengemudi 3 . Petugas Kamar Gelap 4 . Petugas Keamanan			3	340
2	245-300					
1	190-240	1 . Binatu Rumah Sakit 2 . Pramu Kebersihan 3 . Pramu Bakti			1	190

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Setor dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDIANTO, SH
 NIP. 197806012006041004